



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Politik

Senin, 1 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. KABINET BARU LANGSUNG KERJA (*Media Online Media Indonesia*)

Kabinet Baru Langsung Kerja

Jokowi meminta kabinetnya kelak bekerja keras, mampu bersinergi dengan pemda, dan mengawasi semua program yang dijalankan. Menteri bisa berasal dari kalangan profesional ataupun politikus.

CAHYA MULYANA

KABINET baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo segera dibahas pertengahan September mendatang. Jokowi menginginkan kabinetnya itu dapat langsung bekerja begitu diumumkan.

"Jadi, semua pengisi kabinet pemerintahan ke depan harus mau bekerja, bekerja, dan bekerja. Bukan sekadar membuat program dan mengakali anggaran. Namun, kita pastikan kabinet yang akan dibahas pada pertengahan September itu bisa bekerja yang kinerjanya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat," ungkap Jokowi di sela menghadiri acara Muk-tamar PKB III di Hotel Empire Palace, Surabaya, kemarin.

Jika tidak mampu bekerja

5 Opsi Arsitektur Kabinet Jokowi-JK

- Postur kabinet yang sama dengan *status quo*
- Perampingan Kementerian dari 34 menjadi 20
- Kabinet berbasis ideologi Trisakti
- Kabinet berbasis fungsional
- Kabinet kombinasi dari opsi-opsi di atas



Sumber: Tim Transisi Jokowi-JK Grafik: CMO3050

secara optimal, menteri yang bersangkutan akan langsung diganti.

"Menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik langsung diganti karena masih banyak yang mengantre untuk bekerja menjalankan amanat sebagai pelayan masyarakat," tegas Jokowi.

Ia juga berharap pemerintahan ke depan berjalan lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta kinerja menteri dan pemerintahan daerah dapat bersinergi.

Jokowi menambahkan, jabatan, kecerdasan, titeh, dan asal partai dari menteri terkait tidaklah penting. "Buat apa

pintar, tetapi tidak bisa bekerja dan menguasai masalah? Namun, lebih baik lagi jika pintar teori, mempunyai manajemen kerja yang baik, dan menguasai masalah. Setelah itu, mereka harus mengawasi semua program yang dijalankan."

Dengan tujuan kinerja seperti itu, posisi menteri pada kabinet Jokowi tidak harus berasal dari kalangan profesional. "Juga bisa dari kalangan politikus atau yang memiliki jabatan di partainya."

Dalam kesempatan yang sama, wapres terpilih Jusuf Kalla menegaskan pemerintahan ke depan akan mengefisienkan anggaran negara. Hal itu dilakukan untuk efisiensi

dan optimalisasi anggaran.

JK memaparkan contoh bahwa anggaran negara saat ini masih banyak terbuang sia-sia dan tidak mampu dirasakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Subsidi BBM ditujukan untuk rakyat miskin, tetapi yang merasakan lebih banyak orang kaya maka ke depan kita akan rumuskan cara yang paling tepat guna anggaran dirasakan dan tepat sasaran," paparnya.

Muhaimin

Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipastikan akan mengisi kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Kepastian itu disampaikan

langsung oleh Jokowi sesuai berpidato dalam Muk-tamar PKB di Surabaya, tadi malam.

"Pasti," kata Jokowi menjawab pertanyaan pers apakah Muhaimin juga akan duduk di kabinet pemerintahannya nanti. Namun, Jokowi menolak menyebutkan posisi Muhaimin di dalam kabinet. "Nanti pertengahan September," elak Jokowi.

Di sisi lain, Deputi Tim Transisi Hastu Kristiyanto menjelaskan kerja sama antara Jokowi dan JK terbangun dengan baik. Sejumlah usulan JK juga dimasukkan ke opsi untuk membangun kabinet yang efektif yang bukan didasarkan pada ramping tidaknya kabinet.

Terkait dengan rekam jejak, peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyarankan para calon menteri mendapatkan surat berkelakuan baik rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPAK. (Ami/X-6)

cahya@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @Mido.com
Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com

Jokowi meminta kabinetnya kelak bekerja keras, mampu bersinergi dengan pemda dan mengawasi semua program yang dijalankan, Menteri bisa berasal dari kalangan profesional ataupun politikus.

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #SusunanKabinet #RKP(RencanaKegiatanPemerintah)